

JERAGAN NEMEN: DINAMIKA HUBUNGAN BAKUL-LANGGAN DALAM PERSPEKTIF POLITIK EKONOMI¹

M. Alie Humaedi

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

ABSTRACT

So far, the vendor-customer (*bakul-langgan*) relationship is blamed for perpetuating poverty in the fisherman community. This patron-client relationship has disadvantaged fisherman as customers (*langgan*), and has brought advantages to vendors (*bakul*) as *jeragan nemen* because of their possession of production tools. This position has hardly changed, and the cultural aspect has received a more dominant position than the structural factors in causing poverty. This development is unfortunate, because when the state and the global market could not reach them, this traditional institution (*bakul-langgan*) would sustain the lives of poor fisherman. The wave of reform in 1998 has also transformed this custom institution. It began to lose its patron – client relationship. Today, the vendor – customer relationship has become more functional, and every aspect is negotiable. In addition, there is also a matter of “desecration” of debt which is given by *bakul*. Finally, the spirit of reform has also changed the position of *jeragan nemen* to *langgan*, and many of the subordinates (*pendega*) have become small business leaders. However, the involvement of rent seeking actors such as banks and micro finance institutions on behalf of cooperatives could bring back the fishermen to poverty.

PENGANTAR

Banyak penelitian yang menyimpulkan bahwa persoalan kemiskinan di masyarakat nelayan lebih disebabkan oleh kuatnya cengkeraman sistem

¹ Keseluruhan data dalam tulisan ini merupakan hasil Penelitian Program Kompetitif LIPI sub bidang *Critical and Strategic Social Issues (CSSI)* dengan tema “Persoalan Kemiskinan dari Perspektif Kebudayaan” pada tahun 2009-2010. Terima kasih disampaikan kepada Dr. Ninuk Kleden-Probonegoro, selaku koordinator penelitian, yang telah mengizinkan penggunaan data penelitian tersebut.

tengkulak atau kartel dalam distribusi hasil tangkapan. Penelitian Mubyarto, dkk (1984) di Ujung Batu Jepara menunjukkan bahwa nelayan tradisional dijerat oleh jualbeli yang didasarkan pada sistem utang. Pihak pemberi utang atau *bakul* mengatur sepenuhnya harga. Penelitian payung yang dilakukan Lembaga Kajian Masyarakat Nelayan dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Institut Pertanian Bogor (IPB) sejak tahun 1982-1988 di wilayah Gebang Cirebon, Eretan Indramayu, dan Blanakan Subang juga menjelaskan bahwa nelayan Pantai Utara Jawa umumnya tidak terlepas dari hubungannya dengan *bakul*. Saat itu hampir tidak ada nelayan tradisional yang bersifat mandiri, baik dalam soal penyediaan alat-alat tangkapan maupun dalam soal pemasaran hasil produksinya. Pudjo Semedi (2001), selain melihat hubungan patron klien *toke* (pemilik) dan *pendego* (anak buah) pada perahu-perahu *purse seine*, ia juga melihat bahwa kemiskinan nelayan tradisional non-*purse seine* di Wiradesa Pekalongan lebih disebabkan oleh pasar yang bersifat tertutup. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) hanya menjangkau perahu-perahu besar, sedangkan nelayan tradisional masih dikuasai oleh *bakul* di tingkat lokal. Nelayan tersebut tidak bisa melepaskan ikatannya dengan *bakul* karena utang yang besar untuk keperluan alat-alat produksi. Penelitian juga mensinyalir bahwa meskipun tidak ada sistem rente yang jelas, namun hubungan ekonomi *bakul*-nelayan itu sesungguhnya lebih merugikan pihak nelayan dan menguntungkan pihak *bakul*.

Praktik tengkulak yang telah mengakar ini selalu dianggap sebagai bagian dari aspek kultural masyarakat², dan menjadi penyebab pengimbang dari lemahnya daya dukung struktural yang ada. Ketidakmampuan negara dalam mengelola dan menjaga sumber daya laut, misalnya, ditutupi oleh penyalahan aspek kultural masyarakat yang telah menjadi lembaga tradisi dengan dua artinya, yaitu organisasi dan relasional. Meskipun telah banyak rumusan tentang pendampingan dan pemberdayaan di sektor perikanan laut, seperti upaya ko-manajemen pengelolaan sumber daya laut (Adhuri 2004), penguatan hak ulayat laut (Ali 2006), Gerbang Mina Bahari (Satria 2009), serta kebijakan pemerintah pusat dan daerah

² Pernyataan ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa sistem tengkulak, kartel dan ijon sebenarnya telah ada dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari praktik kebudayaan masyarakat di bidang ekonomi. Kemampuan dan kemauan individu di masyarakatlah yang memungkinkan sistem ini dapat berkembang atau tidak saat mereka berhubungan ekonomi. Bagaimana pun, sebagai makhluk ekonomi, pencarian keuntungan dengan berbagai caranya akan selalu ada. Sistem sosial yang dibentuk dan berlaku itulah yang menjadi pembatas dari sistem ekonomi ini.

mengenai Kawasan Bahari Terpadu, namun hari demi hari, laut semakin tidak memberi jaminan kesejahteraan bagi nelayan tradisional.

Permasalahannya, apakah rumusan tentang pendampingan dan pemberdayaan di atas juga memperhatikan secara seksama perkembangan terakhir fenomena yang ada dalam aspek kultural masyarakat yang acapkali dipersalahkan? Semisal hubungan *bakul-langgan* yang telah berubah sejak tahun 1998. Sayangnya, baik pengusul berbagai rumusan ataupun pemerintah sekalipun sering lepas tanggung jawab bila ada dugaan bahwa penyebab kemiskinan suatu masyarakat berujung pangkal dari kesalahan mereka sendiri, khususnya yang berasal dari aspek-aspek kulturalnya. Bahkan, hal ini seringkali telah dianggap menjadi “takdir alam” yang harus diterima bulat-bulat oleh nelayan.

Padahal, di dalam proses menjalani “takdir alam” itu, para nelayan dengan alami dan bersungguh-sungguh juga telah berusaha memilah mana takdir alam yang harus diteruskan untuk menyejahterahkan keluarganya, dan mana pula “takdir alam” yang harus ditinggalkan karena berpotensi memiskinkannya. Pemilahan bisa berdasarkan pengalaman langsung ataupun melalui pengaruh luar yang masuk menerobos ke dalam kesadaran mereka. Nilai normatif dan strategi adaptasi kemudian dapat dilakukan secara memadai dan berkesesuaian dengan kondisi kehidupannya.

Salah satu “takdir alam” atau secara teoritis bisa disebut lembaga tradisi yang kerap dipersalahkan sebagai penyebab kemiskinan itu adalah hubungan *bakul* (perantara) dengan *langgan* (nelayan tradisional). Dahulu hubungan sosial-ekonomi ini, seperti kesimpulan penelitian di atas, kerap kali dilihat sebagai hubungan patron klien mutlak yang secara fungsional sepenuhnya menguntungkan para *bakul* sehingga *bakul* menduduki posisi “*jeragan nemen*” (juragan sejati). Hubungan ini pun dianggap tidak menguntungkan para *langgan* sedikit pun.

Reformasi tahun 1998 tidak hanya diartikan era baru perubahan di bidang politik kekuasaan. Bagi masyarakat nelayan, reformasi telah mendorong mereka melakukan gerakan sosial untuk memperbaiki hubungan *bakul-langgan* tidak atas dasar utang. Gerakan itu dimulai dari wilayah Jawa Barat, yaitu Eretan Indramayu, dengan bentuk penolakan *langgan* untuk membayar utang kepada *bakul*³. Penolakan ini diiringi pula dengan

sikap antipati mereka untuk menjual hasil tangkapan kepada *bakul*. Dekade tahun 2000 dapat disebut sebagai dekade perubahan nasib bagi masyarakat nelayan. Hal ini tampak dari kenyataan bahwa “dari orang yang bukan pemilik alat produksi menjadi pemilik alat produksi; dari posisi *jeragan* palsu menjadi “*jeragan nemen*”, dari *pendego* menjadi *jeragan*,” dan terjadi pula modernisasi dalam teknologi alat tangkapan.

Ada beberapa bagian etos yang meredup dengan sendirinya. *Ngiteng* sebagai tradisi memperbaiki jaring rusak dan bukti hubungan kerja antara *pendego* dan *jeragan* sedikit demi sedikit tergantikan dengan pilihan membeli jaring baru.

Hubungan *bakul-langgan* kemudian lebih bersifat terbuka. Utang tidak lagi diartikan sebagai fasilitas untuk mendominasi *langgan*, tetapi sebatas itikad baik suatu hubungan. Anehnya, persebaran utang kepada berbagai pihak, seperti bank *titil* dan lembaga keuangan mikro, semakin nyata ketika bentuk baru hubungan *bakul-langgan* ini dipraktikkan. Hal ini berbeda dengan kondisi sebelumnya, utang para *langgan* hanya terpusat pada *bakul*, tanpa sistem rente. Sayangnya, potensi relasional sosial-ekonomi bahwa di dalam hubungan *bakul-langgan* dan juga *jeragan-pendego* yang menjadi wadah “orang bisa menghidupi orang” walaupun sebatas kebutuhan minimum pada saat sepi tangkapan, seperti yang dipraktikkan dahulu, selalu dianggap berbahaya bagi masa depan nelayan. Padahal, hubungan seperti inilah yang sebenarnya mampu menjamin eksistensi orang miskin dalam batas subsistensi sekalipun.

Persoalan dilematis dari bentuk baru hubungan *bakul-langgan* dan kelemahan hubungan *bakul-langgan* di masa lalu inilah yang mendorong tulisan ini untuk menjelaskan secara detail hubungan sosial-ekonomi yang seringkali dianggap sebagai aspek kultural yang memiskinkan nelayan di Tunggulsari Kaliori Rembang Jawa Tengah. Apakah perebutan, pengolahan, dan distribusi sumber daya kelautan melalui

³ Saat itu, nelayan di sepanjang Pantai Utara Jawa, seperti Mundu Pesisir, Gebang, Bulakamba, Tegal dan seterusnya kemudian ikutserta melakukan gerakan sosial itu. Gerakan sosial itu diwarnai dengan beberapa aksi pembakaran perahu dan pemukulan terhadap *bakul* dan petugas TPI. Gerakannya ada yang diwadahi oleh kelompok-kelompok perhimpunan nelayan, tetapi ada juga yang digerakkan oleh tokoh-tokoh kharismatik. Seorang *bakul* kecil di Gebang Cirebon yang telah memiliki 15 *langgan* dengan modal hampir 200 juta misalnya, serta merta kehilangan *langgan*. Utang yang diberikan kepada *langgan* sebagai modal pembelian perahu dan alat tangkap tidak pernah dikembalikan sedikit pun. Selain ia, puluhan bahkan ratusan *bakul* mengalami hal serupa. Demikian juga *bakul* di Tunggulsari Kaliori yang awalnya berjumlah 24 orang, kemudian menyusut karena banyak di antara mereka yang bangkrut. Sayangnya belum ada penelitian yang cukup memadai untuk gerakan sosial nelayan pasca tahun 1998.

hubungan *bakul-langgan* itu menjadi inti permasalahan kemiskinan, atau ada alasan lain yang bersifat *invisible hand* yang menyebabkan mereka terus-menerus berada pada posisi itu?

PERSPEKTIF ATAS KEMISKINAN NELAYAN

Analisis terhadap permasalahan di atas akan didekati melalui pendekatan politik-ekonomi. Pendekatan ini sendiri ditekankan pada usaha untuk tidak memisah-misahkan berbagai kepentingan individu dan kelompok, termasuk pemerintah, dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial-ekonomi. Ada dua bahasan utama untuk menjabarkan pendekatan ini ke dalam persoalan kemiskinan nelayan, yaitu penjabaran tentang hubungan patron-klien dan penjabaran mengenai latar interaksi perebutan sumber daya alokatif dan otoritatif.

Hubungan Patron-Klien sebagai Pintu Masuk

Berbagai pertanyaan tentang penyebab kemiskinan nelayan selalu muncul seiring dengan diluncurkannya berbagai kebijakan dan program pemerintah. Apa sebenarnya yang terjadi? Padahal, mereka hidup di sekitar wilayah yang bergelimang sumber daya tak terhingga. Pertanyaan ini tidak bisa dijawab secara normatif begitu saja, bahwa mereka miskin karena malas bekerja atau karena boros berbelanja. Dalam kacamata Arif Satria (2003b), sedikitnya ada dua pendekatan yang bisa diajukan, yaitu pendekatan modernisasi dan pendekatan strukturasi⁴.

Pertama, pendekatan modernisasi yang selalu menganggap bahwa persoalan kemiskinan disebabkan oleh faktor internal masyarakat. Dalam pendekatan ini, kemiskinan nelayan ada akibat faktor budaya seperti kemalasan, keterbatasan modal dan teknologi, serta keterbatasan manajemen. Oleh karena itu, pendekatan ini selalu sarat dengan proposal modernisasi bagi kehidupan sosial-ekonomi nelayan, yaitu bahwa sudah sepatutnya nelayan mengubah budaya, meningkatkan kapasitas teknologi, dan memperbaiki sistem usahanya.

Kedua, pendekatan struktural yang selalu menganggap bahwa faktor

⁴ Dua pendekatan umum ini sebenarnya mendapatkan perlawanan dari kelompok yang memandang bahwa ada kompleksitas dari suatu faktor penyebab. Ia tidak bisa dipisahkan dalam batas yang tegas apakah penyebab itu masuk ke kategori kultural (modernisasi) atau struktural. Oleh karena itu, ada tawaran pendekatan lain yang lebih bersifat kompleks, yaitu pendekatan liberal, radikal, dan heterodoks untuk melihat persoalan-persoalan kemiskinan seperti ini.

eksternal yang menyebabkan kemiskinan nelayan. Nelayan miskin bukan karena budaya atau terbatasnya modal, melainkan karena faktor eksternal yang menghambat proses mobilitas vertikal nelayan. Faktor eksternal tersebut berjenjang, baik pada tingkat mikro-desa maupun makro-struktural. Pada tingkat mikro-desa, masih ditemukan sejumlah pola hubungan patron-klien yang bersifat asimetris, yakni suatu pola hubungan di mana terjadi transfer surplus dari nelayan ke patron (*bakul*). Sementara itu, pada tingkat makro-struktural, belum adanya dukungan politik terhadap pembangunan kelautan dan perikanan secara memadai, sehingga sektor itu tidak mampu berkembang sebagaimana sektor lainnya.

Seperti disebutkan di atas, salah satu masalah yang sering dihubungkan dengan kemiskinan masyarakat nelayan adalah soal hubungan patron-klien, misalnya dari *pendego* ke *jeragan*, *jeragan* ke *bakul*, dan *bakul* ke *distributor utama*. Kuatnya ikatan patron-klien yang ada di masyarakat nelayan harus dipahami sebagai konsekuensi dari sifat kegiatan penangkapan ikan yang penuh risiko dan ketidakpastian. Bagi nelayan, menjalin ikatan dengan patron (juragan, *bakul*, distributor) adalah langkah penting menjaga kelangsungan kegiatan. Dengan demikian, pola patron-klien yang tercermin dalam hubungan *bakul-langgan* merupakan salah satu institusi jaminan sosial-ekonomi.

Hal ini terjadi karena hingga saat ini nelayan dianggap belum menemukan alternatif institusi yang mampu menjamin kepentingan sosial-ekonominya. Meskipun diakui bahwa nelayan memiliki solidaritas sesama yang kuat, etos kerja, dan mobilitas tinggi, tetap saja masih memiliki sejumlah kelemahan, khususnya kemampuan mengorganisasi diri, baik untuk kepentingan ekonomi maupun profesi. Terlebih ketika sebagian nelayan masih menganggap bahwa status nelayan sebagai *way of life* sehingga etika subsistensi masih menjadi pegangannya.

Ikatan komunal yang ada, seperti ikatan dengan patron, umumnya dipertahankan untuk menjaga kepentingan subsistensinya. Hal ini dianggap sebagian besar peneliti sebagai biang kemiskinan. Pada sisi yang lain, hubungan patron klien yang tidak lagi mutlak, bersifat fungsional dan negosiasif sepertinya akan mengarahkan lembaga tradisi ini untuk tidak mereproduksi kemiskinan. Bentuk baru hubungan itulah yang diharapkan menjadi terobosan lembaga tradisi ini untuk mereduksi kemiskinan masyarakat nelayan.

Dua sifat utama itu, fungsional dan negosiasif, harus selalu didorong untuk selalu melekat pada hubungan *bakul-langgan* di atas. Peran pemerintah dalam soal ini menjadi penting, sepenting upaya masyarakat sendiri untuk tetap menjaga fungsi lembaga tradisinya. Pemerintah melalui kewenangannya dapat menyediakan permodalan tanpa rente agar *langgan* bisa terputus dari jerat utang para *bakul*, sehingga posisi *langgan* tidak lagi berada pada pihak yang didominasi oleh pemilik modal. Transaksi hasil produksi yang ada kemudian dilepas berdasarkan mekanisme pasar yang bersifat terbuka. Jalinan seperti inilah yang digambarkan oleh Anthony Giddens (1984) dengan hubungan segitiga antara negara, masyarakat, dan pasar. Bila hubungan segitiga ini secara fungsional berjalan sinergis, maka aspek-aspek penyebab kemiskinan, baik dari sudut pendekatan modernisasi dan struktural dapat teratasi.

Latar Interaksi Perebutan Sumber Daya Alokatif dan Otoritatif

Giddens (1984:119) menyebut ruang interaksi berbagai kepentingan sebagai *locale*. Kata ini memiliki hubungan erat dengan konsep regionalisasi geografi-waktu yang tidak hanya berarti “penentuan tempat”, tempat modalitas strukturalisasi⁵ atau kemampuan transformatif yang mengarah pada kekuasaan para aktor akan dilakukan. Konsep kekuasaan sebagai kemampuan transformatif pandangan khas yang dipegang teguh oleh orang yang memperlakukan kekuasaan dalam istilah perilaku sekaligus dominasi, fokus utama orang yang menyoroti kekuasaan sebagai kualitas struktural seluruhnya bergantung pada pemanfaatan sumber daya (Giddens 1979; dalam terj.:162). Bisa juga, sumber dayanya berupa media yang berfungsi untuk menjalankan kemampuan transformatifnya sebagai kekuasaan di dalam perjalanan rutin interaksi sosial. Namun, pada saat yang sama media tersebut menjadi unsur-unsur struktural sebagai sistem sosial, yang ditegakkan ulang melalui pemanfaatannya dalam interaksi sosial.

Lebih dari itu, regionalisasi geografi-waktu adalah juga penetapan wilayah “dominasi” yang berhubungan erat dengan berbagai

⁵ Modalitas merepresentasikan dimensi utama dualitas struktur di dalam penciptaan interaksi. Modalitas strukturalisasi dimanfaatkan oleh para aktor untuk melakukan dan menciptakan interaksi, namun pada saat yang sama juga menjadi sarana untuk mereproduksi aneka komponen struktural sistem interaksi. Ketika analisis institusional difokuskan, maka modalitas diperlakukan sebagai khazanah pengetahuan dan sumber daya yang dimanfaatkan oleh para aktor dalam melakukan interaksi sebagai prestasi yang menunjukkan kecakapan dan keahlian, di dalam kondisi terbatas rasionalisasi tindakan.

kegiatan sosial-ekonomi yang dirutinisasikan”. Karena itu, *locales* diregionalisasikan secara internal sehingga ia bukanlah dimensi kosong dari tempat pengelompokan sosial menjadi terstruktur, melainkan juga sesuatu yang harus dipertimbangkan dalam rangka keterlibatan pembentukan sistem interaksi. Satu contoh sederhana, bila pengusaha perikanan (distributor) menetapkan Tunggulsari, misalnya, sebagai sentra penyuplai produksi udang, maka pengusaha tersebut akan ikut mengontrol semua perilaku sosial-ekonomi penduduk di desa itu, termasuk penggunaan jaring para nelayan. Di samping juga terus-menerus menyusun dan mengkoordinasikan *bakul* sebagai aktor lapangan untuk menyesuaikan rutinisasi yang ada.

Dalam soal sumber daya yang ikut terlibat aktif dalam pembentukan struktur dominasi, Giddens membaginya dengan dua macam kategori. *Pertama*, sumber daya alokatif (*allocative resources*) yang memungkinkan dominasi manusia atas dunia material, misalnya bahan mentah, peralatan produksi, teknologi, dan hasil produksi. *Kedua*, sumber daya otoritatif (*authoritative resources*) yang memungkinkan dominasi manusia atas dunia sosial. Dibandingkan dengan sumber daya alokatif, sumber daya otoritatiflah yang lebih berfungsi sebagai pengarah dari pola interaksi sosial dan pembentukan kuasa di masyarakat (Suhartono 2000:30). Pengorganisasian ruang sosial serta organisasi dan relasi manusia dalam asosiasi timbal balik seperti hubungan patron-klien, misalnya, menjadi salah satu contoh nyata dari pembentukan struktur dominasi atas sumber daya alokatif dan sumber daya otoritatif itu.

Bila diperhadapkan dengan hubungan segitiga antara negara, masyarakat, dan pasar seperti pendapat Giddens di atas, maka strukturasi dominasi sumber daya itu akhirnya akan berujung pada satu proses yang “mengikat ke dalam”. Inilah yang membuahkan kesadaran praktis, juga melahirkan berbagai praktik sosial yang berlangsung secara berkelanjutan dalam ruang dan waktu. Di bidang sosial-budaya, hubungan ini bisa bersifat patron klien karena alasan dominatif sumber daya itu. Sedangkan di bidang ekonomi, bisa melahirkan praktik ekonomi yang tertutup dan tidak negosiasif. Sistem ini menguntungkan pelaku perantara dan pemain puncak ekonomi pasar, dan mematikan pihak di tingkat produksi. Kerangka berpikir seperti inilah yang digunakan untuk melihat hubungan *bakul-langgan* di masyarakat nelayan Tunggulsari Kaliori Rembang.

WILAYAH NELAYAN SEBAGAI LATAR INTERAKSI PEREBUTAN SUMBER DAYA

Wilayah yang memiliki potensi sumber daya laut, termasuk desa nelayan Tunggulsari, Kaliori Rembang dapat menjadi suatu latar interaksi perebutan dan transaksi sumber daya antara berbagai pihak. Negara dengan kebijakan dan programnya tidak sekedar menyejahterakan warganya, tetapi juga memiliki kepentingan menghidupi seluruh jenjang birokrasinya. Tangan-tangan negara, termasuk Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dimainkan untuk mengunduh hasil laut⁶. Demikian juga anggota masyarakat dan pelaku pasar berusaha mencari penghidupan di sana. Wilayah potensial seperti ini sering disebut wilayah gersang; gerah tapi merangsang. Gerah karena panasnya iklim pesisiran dan suasana perebutan sumber daya, serta merangsang karena berhubungan dengan potensi sumber daya laut bernilai jutaan bahkan miliaran bila diperhadapkan dengan pasar ekspor global.

Wilayah, sekalipun desa, adalah ruang tempat berbagai interaksi muncul dan dimainkan seperti yang dinyatakan Giddens di atas. Ruang seperti itu sendiri selalu berwujud dan mempunyai pengertian dimensi geografi (Saort 1984:13). Melihat ruang secara geografis berarti melihat ruang dari sudut pandang ekologi, sosial-ekonomi, morfologi, dan sistem kegiatan. Bila dilihat secara ekologi, letak wilayah nelayan yang berada di pinggir laut harus dilihat sebagai satu kesatuan antara ruang fisik ekonomi dengan orientasi hidup masyarakat, tempat orientasi *segoro* bersemayam. Sedangkan secara sosial-ekonomi berarti melihat wilayah ini dengan potensi perikanan laut dan garam yang cukup besar. Adapun secara morfologi umumnya dilihat dari sebuah perkembangan fisik wilayah yang disebabkan adanya campur tangan para pemimpin dan pihak lain seperti pelaku pasar; yang bisa jadi kehadiran dan partisipasinya disebabkan oleh adanya potensi sosial-ekonomi yang

⁶ Selain tugas melelang ikan, TPI juga memiliki tugas menarik retribusi (tarikan). Perinciannya: hasil penjualan (raman) udang Rp 50.000-100.000 dikenakan retribusi sebesar Rp 2.000, dan Rp 100.000 ke atas dikenakan retribusi Rp 3.000. Semua hasil tarikan dari nelayan ini dikumpulkan petugas TPI. Selain tarikan, nelayan juga dimintai jimpitan untuk keperluan TPI dan sebagian lainnya untuk pembangunan infrastruktur desa. Tercatat bahwa petugas jimpitan di TPI Tunggulsari pada tahun 1990-2010 dipegang kamituwo dusun Tunggulsari. Adapun bagi nelayan yang tidak menjual hasil tangkapan di TPI, yaitu kepada bakul di rumah, jimpitan udangnya akan dilakukan seseorang yang bekerja khusus untuk itu. Dalam soal jimpitan kisik, hasil laut berupa sejenis kerang kecil, diambil tindakan bahwa setiap bakul diberi satu ember (timba), dan bakul sendiri yang menjemputnya. Seluruh hasil jimpitan langgan yang dilakukan bakul diambil petugas jimpitan yang ditetapkan oleh Kelompok Nelayan.

dimiliki beserta sistem kegiatan yang berlaku di wilayah itu. Sistem kegiatan ini terlihat nyata karena umumnya sudah bersifat rutin.

Oleh karena itu, seluruh upaya memperebutkan ruang adalah proses untuk mendapatkan sumber daya yang tersedia di wilayah itu, atau juga untuk sekadar menyimbolkan sesuatu. Dalam konteks ini, kontestasi dan negosiasi perebutan atau akses terhadap sumber daya kelautan pun akan sering dilakukan dengan berbagai cara, termasuk dengan cara mendominasi pada tingkat distribusi hasil laut seperti ikan dan udang. Salah satu contohnya, TPI Tunggulsari tidak lagi dapat melakukan pelelangan hasil laut, akibat campur tangan distributor yang lebih senang menggunakan *bakul* sebagai pelaku di lapangan. Pilihan ini dilakukan karena di samping berbiaya murah, ketersediaan pasokan hasil laut untuk pasar global pun dijamin keamanannya oleh para *bakul*.

Permintaan pasar ekspor atas udang saja, misalnya setiap tahun membutuhkan pasokan sedikitnya 400.000-500.000 ton. Bahkan, pada tahun 2011 kebutuhan pasokan udang diproyeksikan mencapai jumlah 620.000 ton bila asumsi kenaikan per tahunnya 15.83% (DKP 2010:4). Nilai jual pasokan tersebut hampir mencapai 3 miliar dolar, setara dengan ekspor bidang migas. Suatu jumlah menggiurkan yang tentu diperebutkan pelaku usaha di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Persoalannya, bagaimana perilaku masyarakat dapat diarahkan atau disesuaikan dengan kepentingan pelaku pasar, padahal di saat yang sama kepentingan ekonomi pasar global sebenarnya terus menebar dan berusaha menancapkan dominasinya kepada komunitas nelayan tradisional ini?

Pada tahun 2009, Dinas Kelautan Kabupaten Rembang mencatat nelayan Rembang ikut menyumbang pasokan ekspor udang nasional sedikitnya 12.000 ton (BPS Rembang 2010:16-19). Di tingkat lokal, jumlah ini merupakan hasil tangkapan nelayan pada lima kecamatan pesisir Rembang. Nelayan Desa Tunggulsari Kaliori sendiri ikut menyumbang pasokan udang Kabupaten Rembang sebesar 400 ton pada tahun 2008 (Kaliori 2009). Walaupun jumlah tersebut terlihat kecil, namun angka 400 ton atau 400.000 kg itu nilai jualnya mencapai Rp 30 miliar per tahun bila asumsi harga udang di tahun 2008 itu Rp75.000/kg. Artinya, pihak eksportir atau distributor utama dengan bantuan *bakul* di lapangan akan berlomba untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya hasil tangkapan nelayan Tunggulsari.

Dalam konteks pasokan pasar global inilah, hubungan *bakul-langgan* kemudian dapat diartikan bersifat dominatif, *bakul* mendominasi *langgan* dalam aspek distribusi sumber daya. Sayangnya, sifat dominatif ini telah menjadi budaya massa sehingga masyarakat pun tidak lagi bisa membedakan mana hubungan yang sifatnya fungsional ekonomis dengan hubungan personal. *Bakul* di tingkat lokal kemudian menjadi institusi dan kelas sosial tertentu yang memegang dominasi atas sumber daya ekonomis berupa hasil tangkapan, termasuk “tubuh” nelayannya sendiri dengan kekuasaan yang melekat pada otoritas *bakul*. Dalam perspektif ini wajar bila identitas *jeragan nemen* yang dilekatkan pada *bakul* sebelum dekade 2000, sesungguhnya adalah identitas dominatif. *Bakul* memiliki kuasa penuh terhadap sumber daya alokatif sekaligus sumber daya otoritatif yang dimiliki nelayan *langgannya*. Apakah sifat dominatif itu merugikan? Jawaban atas pertanyaan itu tidak selalu berada pada aras normatif. Seperti halnya lembaga tradisi yang memiliki potensi mereduksi kemiskinan di satu sisi dan di sisi lain mereproduksi kemiskinan (Kleden-Probonegoro & Humaedi 2010), maka sifat dominatif pada hubungan *bakul-langgan* pun demikian adanya.

Tunggulsari Kaliori: Wilayah “Dari Para Blegendar ke Nelayan Miskin”

Tulisan ini tidak hendak menganalisis fenomena kenelayanan dalam spektrum wilayah yang besar, tetapi kasus nelayan pada desa Tunggulsari Kaliori akan dikemukakan sebagai bagian pernyataan bahwa keadaan nelayan beserta kebudayaannya pada prinsipnya bersifat berbeda dan memiliki karakternya masing-masing. Dibandingkan dengan tiga desa pesisir lainnya di Kaliori Rembang (Pantiharjo, Banyudono, dan Purworejo), nelayan terbanyak berada di Tunggulsari. Jumlahnya hampir mencapai 90%, dan 10% lainnya bermata-pencarian tani tambak (tambak udang dan garam). Desa ini dibatasi sungai Randu Gunting yang membelah wilayah Rembang dan Pati. Di sungai itu sedikitnya ada 400 perahu. Dari jumlah itu, 250 perahu milik nelayan Tunggulsari Rembang dan 150 lain milik nelayan Pecangaan Pati (Kaliori 2009:4). Setiap harinya, pada musim biasa (tidak *leyep* dan tidak pula *rejuh*), 60-80% jumlah perahu itu melaut.

Sebelum tahun 1950, Tunggulsari dikenal sebagai desa para *blegendar* atau *jeragan nemen* (juragan sejati). *Blegendar* adalah orang paling kaya yang memiliki ratusan *kledokan* sawah, puluhan perahu beserta *pendego*

(pengurus perahu), puluhan bangunan rumah, gudang, perhiasan, dan kendaraan. Saat itu, Tunggulsari diwarnai kemakmuran dari hasil laut. Pada masa kolonial Belanda, Tunggulsari dikenal memiliki empat juragan besar di bidang kelautan. Mereka adalah H. Abdurrahman (ayah sesepuh desa), H. Muslim (kakek istrinya ketua UPK Kaliori), H. Tarno (ayah Petinggi), dan H. Fii (Kakek istri Petinggi). Keempatnya memiliki perahu-perahu berukuran besar; perahu barang setingkat tongkang dan perahu khusus tangkapan ikan setingkat perahu *purse seine*. Mereka juga memiliki perahu-perahu berukuran kecil yang dijalankan orang sekitar untuk menangkap ikan. Seluruh hasil ikan *dibleng* (diasinkan) dan digudangkan.

Abdurrahman memiliki tiga gudang ikan berukuran besar dan dua gudang beras. Setelah semua gudang terisi penuh, komoditas itu ditambah kayu jati dan cengkeh diangkut kapal barangnya untuk dikirimkan ke Ciasem (Subang), Pamanukan, Batavia, dan Banten. Dari wilayah itu, kapal-kapal tersebut kembali membawa beras, kopi, dan teh. Sebelum kapal penuh, para *pendego* belum diperbolehkan berlayar kembali ke Tunggulsari. Sesampainya di Tunggulsari, beras dan aneka barang bawaan dijual di pasar Rembang dan wilayah pedalaman Rembang dan Pati. Hal seperti ini juga dilakukan tiga *blegendar* lain. Mereka memiliki jaringan pasar berbeda. Muslim hanya mengkhususkan perdagangan ke Pamanukan; Tarno ke Sumatera, dan Fii lebih meluaskan pasarnya ke Sumatera dan Sulawesi.

Keempat orang ini rata-rata memiliki *pendego* lima puluhan orang, ditambah *ngenger* untuk urusan rumah, dan gudang hampir sepuluh orang. Rumah, tanah, dan sawahnya tersebar di mana-mana, bahkan di wilayah distribusinya juga. Saat itu, Tunggulsari dengan keberadaan *blegendarnya* merupakan wilayah yang disegani orang. Sayangnya, sepeninggal mereka, posisi *jeragan nemen* dalam bahasa nelayan atau *blegendar* ini tidak ada yang menggantikan. Jaringan usaha mereka surut dengan semakin menguatnya pemanfaatan kendaraan bermotor di jalur Pantura Deandels pada tahun 1950-an. Perahu pengangkut barang jarang dimanfaatkan karena tingginya biaya dan lamanya waktu perjalanan. Surutnya perjalanan perahu barang itu juga ikut menyurutkan usaha di bidang penangkapan ikan, sebagai bahan industri pengasinan.

Masyarakat wilayah Subang, Pamanukan, Batavia, dan Banten kemudian lebih banyak menyerap ikan yang berasal dari Indramayu,

Cirebon, dan Tegal karena lebih murah. Para penerusnya berusaha mengalihkan jaringan pasarnya ke Rembang, Pati, dan sekitarnya. Pilihan itu kalah bersaing oleh jaringan pedagang Cina yang telah lebih dahulu menguasai pasar distribusi. Surutnya perdagangan antardaerah itu juga ikut menyurutkan perkembangan ekonomi masyarakat nelayan Tunggulsari. Mereka akhirnya kebanyakan menjadi nelayan tradisional yang miskin, walaupun kalkulasi penangkapan hasil laut mencapai miliaran rupiah.

Kegiatan Rutin, Sejahtera pun Tidak

Tulisan pada sub ini hendak memaparkan adanya sistem kegiatan masyarakat nelayan yang secara rutin dilakukan tetapi tidak juga membuahkan kesejahteraan. Kenyataan tersebut penting disajikan untuk memberi gambaran bahwa persoalan kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh aspek internal masyarakat sendiri, tetapi juga ada aspek-aspek yang berasal dari luar dirinya yang menyebabkan mereka miskin. Dalam rutinitas masyarakat, laki-laki dewasa (sebagian masih usia sekolah) pergi melaut sesuai jenis jaring (*saja*) yang dibawa. Sebelum tahun 2000, ritme kepulangan nelayan dari laut mudah dipastikan. Bagi pengguna *saja* plastik khusus tangkapan udang, perahunya dipastikan akan merapat antara pukul 14.00 - 16.00. Demikian juga, dengan nelayan pengguna jaring *kejer*, pagi setelah shalat shubuh mereka berangkat dan pukul 12.00 mereka akan tiba di perkampungan. Mereka mengambil rajungan yang tertangkap, sekaligus memindahkan jaring *kejer* sepanjang 300 meter itu ke tempat lain yang dianggap banyak rajungan. Setelah tahun 2000, jadwal itu berubah drastis. Hal ini disebabkan, seperti dituturkan Pak Amir, tidak lagi banyak ikan. Pascatahun 2000 Direktorat Jendral Perikanan Laut (DKP 2002) juga mencatat terjadinya fenomena *overfishing* di laut utara Jawa, khususnya di Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Waktu pulang juga ditentukan oleh situasi musim; *rekeh* (ramai ikan) atau *leyep* dan *pailah* (sepi ikan). Pada musim *rekeh*, si nelayan pulang lebih lambat karena banyaknya hasil tangkapan. Sementara itu, pada musim *leyep*, mereka pulang lebih cepat daripada berputar-putar di laut dan menghabiskan banyak solar. Mereka pergi pukul 04.00 atau sehabis subuh dan pulang minimalnya pukul 09.00 (bila sepi) dan maksimal pukul 16.00 (bila ramai). Sehabis menambatkan perahu, rutinitas lain adalah pemilik perahu wajib membuang air yang masuk

ke perahu, merapikan *saja*, meluruskan pipa kipas mesin ke *demplo*, dan mengoleskan oli ke mesin dan pipa, agar tidak terjadi korosi. Hampir semua mesin perahu sekarang bermerk Dompeng, asal Cina. Dahulu, mereka memakai Kubota dan Yanmar. Namun, karena dua merk terakhir ini berharga mahal (Rp 8-12 juta), terlebih ketika terjadi kerusakan biaya perbaikan dan komponennya sangat tinggi, masyarakat lebih memilih memakai merk Dompeng yang berharga murah (Rp 3-5 juta). Mesin ini bertenaga kuat dan bandel meskipun cepat rusak. Mesin hanya mampu bertahan selama 3 tahun, sedangkan dua merk lain bisa bertahan 8-10 tahun.

Para perempuan nelayan akan menunggu suaminya dengan beberapa kegiatan. Ada yang menonton televisi; ada yang mengobrol dengan tetangga; dan ada yang sibuk mengurus anak. Semua terlihat secara terbuka karena rumah mereka hampir semua pintunya terbuka. Ada juga yang bekerja sebagai pengupas udang dan rajungan; ada yang menjadi *bakul macal* (*bakul* sayur keliling); ada juga yang terlibat dalam usaha pembuatan kerupuk. Selain itu, mereka juga kebanyakan *menetel iwak* secara kecil-kecilan, baik untuk konsumsi sendiri ataupun untuk dijual kepada orang lain. Ikan-ikan itu diperoleh dari tangkapan suaminya atau hasil *alang-alang* (*gosek*) anaknya, atau membeli sedikit dari tetangga dan para *pengalang-alang* itu. Sayangnya, kegiatan rutin laki-laki ataupun perempuan nelayan itu juga tidak menyejahterakan. Dalam monografi Kecamatan Kaliori (Setda 2010), jumlah orang miskin di desa ini mencapai 67% dari jumlah penduduk yang mencapai 300 KK atau 1.200 jiwa itu.

DINAMIKA HUBUNGAN SOSIAL-EKONOMI NELAYAN

Dalam kehidupan nelayan, beberapa kategorisasi sosial dapat dimunculkan. Selain kategori nelayan berdasarkan jenis alat tangkapan (*saja*), ada kategori yang dimunculkan berdasarkan kepemilikan alat produksi. Si pemilik perahu beserta alat penangkapannya bisa disebut juragan atau *jeragan*. Alat produksi ini dijalankan anak buah perahu atau *pendego* juga disebut *bidak*. Sub ini memaparkan beberapa perubahan atau dinamika yang terjadi pada setiap tingkat pelaku utama hubungan *bakul-langgan*. Tujuannya untuk memperoleh potret kemiskinan dan fungsi lembaga tradisi dalam arti relasional pada setiap tingkatannya itu.

Tingkat Juragan

Sejak tahun 2000, pengertian juragan ini berlaku bagi semua nelayan tradisional. Setelah gerakan sosial bersama nelayan di tahun 1998 itu, hampir seluruh nelayan di pantai utara, khususnya Rembang memiliki perahu. Kenyataan ini ada setelah hubungan utang kepemilikan alat produksi antara *bakul* yang sebelumnya menyediakan itu dan nelayan sebagai pihak pengelola terputus akibat semangat reformasi yang menuntut keadilan. Saat itu, banyak nelayan yang tidak lagi mau menggerakkan alat produksi yang dimiliki *bakulnya*. Ketika *bakul* menagih, mereka mempersilahkan untuk mengambil alat produksinya.

Kenyataannya, hampir semua *bakul* tidak pernah meminta kembali perahu, mesin, dan jaring miliknya dari nelayan yang menjadi *langgannya*. Peneliti melihat bahwa sebelum 1997, bila istilah juragan didefinisikan sebagai pemilik alat produksi, maka posisi juragan sebenarnya ada di pihak *bakul*. Mereka lah yang menjadi pemilik alat produksi yang digerakkan nelayan *langgannya*. Sementara itu, *langgan* hanya menjadi “*jeragan kecil*” yang memiliki *pendego* untuk menggerakkan dan mengelola alat produksi juragan besarnya alias *bakul*. Konsekuensi hubungan ini terlihat jelas pada kewajiban *jeragan kecil* untuk menjual hasil tangkapan kepada *bakul*; dan *bakul* dengan harga pasar membeli hasil tangkapan *jeragan kecilnya*. *Bakul* mendapat keuntungan dari selisih harga pasar *bakul* dengan harga pasar di tingkat distributor.

Saat itu *bakul* memiliki posisi kuat karena bisa menekan *jeragan kecilnya* untuk tetap melaut. *Jeragan kecil* sendiri memiliki tanggung jawab mengatur kerja *pendegonya* dan memberikan kompensasi *bagen* (bagian) atas *raman* (seluruh jumlah) yang didapat dari hasil penjualan tangkapan. Posisi antara *jeragan* dan *pendego* saat itu sangat jelas. *Jeragan* dapat menekan atau menyuruh *pendegonya* bekerja semaksimal mungkin, item pekerjaan *pendego* dimasukkan sebagai bagian perhitungan *bagen*. Karena itu, pekerjaan *ngiteng* (memperbaiki jaring), *sait* (menguras dan membersihkan perahu), *joke* (menurunkan perahu), dan *nambat* (menaikkan perahu) semuanya dilakukan *pendego*. Fenomena ini terlihat jelas sebelum dekade 2000-an. Saat itu banyak *pendego* yang harus menginap di rumah *jeragannya*. Sekarang hal itu tidak lagi dijumpai. *Pendego* tidak lagi memiliki pekerjaan seberat itu yang mengharuskan mereka menginap. Semua *pendego* di masa lalu,

sekarang hampir semuanya menjadi *jeragan*. Mereka sama tingkatnya dengan *jeragan* kecil.

Tingkat Pendego

Pendego atau *bendego* adalah kata yang berasal dari *pandega*, berarti ‘penegak atau keanggotaan menjalankan fungsi tertentu di kerajaan’. Makna kata ini direduksi nelayan Kaliori dan sebagian besar nelayan di Pekalongan, Semarang, Demak, Jepara, Pati, Tuban, dan Rembang sebagai julukan untuk anak buah perahu atau kapal. Sebelum tahun 2000, keanggotaan itu diikat dengan utang. Seorang juragan harus siap menyediakan dana utangan bila *pendego* membutuhkan uang untuk kebutuhan keluarganya. Utang dicicil sedikit demi sedikit dari uang *bagennya*. Dahulu banyak *pendego* yang memiliki utang kepada juragan melebihi kemampuannya membayar. Bayangkan saja, hasil pendapatannya adalah 1 *bagen* dari *raman*. Bila *raman* keseluruhannya Rp 100.000,00 mereka hanya mendapatkan uang Rp 10.000,00. Padahal, utang pada juragan bisa mencapai ratusan ribu yang tidak mungkin bisa terbayarkan bila hanya mengandalkan cicilan yang berasal dari satu *bagen raman* itu.

Banyak juragan yang memanfaatkan utang *pendego* sebagai alat ikat untuk tetap bekerja. *Pendego* dari seorang juragan tidak berpindah, kecuali si *pendego* melakukan kesalahan fatal atau juragan dianggap sangat pelit dan kasar. Untuk berpindah, mereka akan minggat sehingga juragan lama mendapatkan penggantinya. Mereka bisa bekerja kepada juragan lain dengan syarat mengembalikan utangnya kepada juragan lama. Minggat itu diartikan langkah untuk mencari pinjaman atau usaha membayar utangnya.

Seperti perubahan nasib *langgan* terhadap *bakul* pada tahun 1998-an, perubahan nasib juga terjadi pada *pendego* atas “juragan kecil”nya. Pada tahun itulah *pendego* lebih bebas memilih untuk tetap menjadi *pendego* atau memulai kehidupannya sebagai juragan perahu. Saat itu, bantuan pemerintah untuk penyediaan alat tangkap dimanfaatkan sedemikian rupa. Mereka yang tidak tersentuh bantuan akan berusaha untuk meminjam kepada saudara atau kepada juragan lamanya yang dianggap baik.

Pada awalnya mereka menjadi “langgan” dari juragan lama yang dianggap baik. Lalu, mereka pun lepas dari juragannya dengan

mencicil uang sedikit demi sedikit. Hal ini berbeda dengan sistem hubungan *langgan* dan *bakul* sebelumnya, yaitu utang kepada *bakul* tidak dilakukan pencicilan. Pengalihan *langgan* kepada *bakul* berarti pembayaran tunai utang yang dimiliki sebelumnya. Sementara itu, pada periode tahun itu, *bakul* baru yang awalnya juragan membolehkan *pendego* yang sekarang menjadi juragan kecil untuk mencicil utang modal pembelian alat produksi. Sifat utang sebagai penanda hubungan *bakul* dengan *langgan* (*pendego*) itu lebih terbuka, dengan perkenan juragan untuk menerima cicilan utang dari mantan *pendegonya*. Ruh reformasi telah memberi kesadaran mendalam kepada seluruh nelayan pada seluruh tingkatnya untuk melakukan praktik sosial bersama itu dengan mendasarkan pertimbangan pada kepastian sosial yang disepakati. Hal ini telah memungkinkan lembaga tradisi dalam arti relasional hubungan *bakul-langgan* dapat bersifat terbuka.

Fenomena terbaru di atas juga membawa perubahan bagi kehidupan juragan lamanya. Sekarang ini, kehidupan keluarganya tidak lagi “terganggu” oleh kehadiran *pendego* di rumahnya. Meskipun hubungan antara juragan dengan *pendego* tetap ada, tetapi hubungan lebih bersifat terbuka dan bebas, karena *pendego* tidak lagi menjadi “milik penuh” dari juragannya. Mereka boleh saja menjadi *pendego* kepada siapa pun yang dianggapnya cocok. Apalagi, hampir semua nelayan adalah juragan dan nelayan juragan-*pendego* yang tidak lagi terlalu membutuhkan *pendego*. Bila ada kebutuhan *pendego*, mereka akan mengambilnya dari masyarakat petani dengan sistem bebas, tidak lagi dengan sistem ikatan berupa utangan. Para *pendego* dengan sistem baru ini pun bebas memilih juragannya atau bebas juga dalam penentuan intensitas waktunya.

Di atas disebutkan bahwa sejak dekade 2000 hampir semua nelayan memiliki perahu dan alat kelengkapannya sendiri atau menjadi juragan. Pertanyaannya, lalu siapa yang menjadi *pendego* atau pelaksananya? Dari keanggotaan nelayan sendiri, hampir tidak ada yang dapat dikatakan sebagai *pendego* murni. Memang ada beberapa orang yang menjadi *pendego* berasal dari kategori *sekeng*, yang betul-betul miskin dan tidak memiliki akses sedikit pun mendapatkan modal.

Secara umum, yang masuk pengertian *pendego* ini adalah mereka yang kebanyakan berasal dari masyarakat petani. Itu pun kategori

pendego spontan karena tidak seluruh waktu didedikasikan untuk kegiatan perahu seorang juragan. Setelah menyelesaikan urusan sawah milik atau garapannya, sehabis musim panen ataupun tanam, mereka memanfaatkannya dengan cara menjadi *pendego* dadakan. Dengan pilihan pekerjaan ini, petani dianggap lebih cair mengembangkan diversifikasi pekerjaan.

Pada sisi lain, dekade perubahan nasib juga memengaruhi teknik penangkapan ikan dan jumlah personalia yang terlibat. Selain *cantrang*, *dogol*, dan modifikasi *trawl* yang melibatkan banyak orang dan menggunakan perahu besar, nelayan tradisional Tunggulsari dengan jenis tangkapan *kejer* dan *plastik* ini tidak memerlukan banyak tenaga. Setiap perahu diisi dua orang nelayan. Keduanya belum tentu berposisi juragan dan *pandego*, seperti dikenal sebelumnya. Keduanya bisa sama-sama juragan atau yang jelas bukan hubungan sejenis patron klien antara juragan dan *pandego*, seperti bapak dan anak yang bekerja sama pada satu perahu. Para nelayan bisa juga merangkap sebagai juragan sekaligus *pendego* dari perahu miliknya sendiri atau milik orang lain.

Selain model di atas ada juga juragan perahu yang melibatkan anaknya yang sudah berusia di atas 12 tahun (setelah lulus SD) untuk ikut serta melaut. Bagi mereka yang tidak memiliki anak atau anak mereka memilih sekolah atau bekerja di tempat lain, mereka mengambil *pendego* dari petani. Hal itu dilakukan pada musim *rejuh*. Tetapi, bila musim *leyep*, umumnya mereka akan berangkat sendirian. Bahkan, ada di antara nelayan yang mengikutsertakan istrinya untuk melaut.

Sekarang ini, dapat dikatakan hampir tidak ada nelayan juragan yang menganggur dan menunggu uang hasil kerja *pendegonya*. Para juragan sekarang terlibat langsung menggerakkan alat produksinya. Jadi, selain perahu atau kapal besar untuk keperluan *dogol* dan *cantrang*, yang di Kaliori jenis perahu ini sedikit sekali dimiliki, posisi juragan sebenarnya sama dengan sebutan nelayan umumnya. Menyebut nelayan di Tunggulsari adalah mereka yang juga menjadi pemilik dan juga pelaksana alat dan kegiatan tangkapannya. Karena itu, hampir semua juragan di Kaliori juga merangkap sebagai nelayan *jeragan-pendego*.

Perubahan Kualitas Juragan

Selain alasan menghemat biaya produksi, ada dua fenomena yang harus dicermati dari perubahan kualitas juragan menjadi *juragan-pendego*.

Pertama, menurunnya kuantitas sumber daya perikanan. Disebutkan para nelayan, bahwa jumlah ikan pada dekade 2000 sangat sedikit. Ada tiga penyebab; i) perubahan musim yang tidak menentu. Keadaan musim tidak lagi jelas; antara musim penghujan (*rendeng*) dan panas (*ketigo*), atau antara musim Barat dan Timur tidak lagi dapat dipisahkan pada waktu-waktu tertentu; ii) banyaknya perahu besar yang mengambil ikan di bawah jarak 5 mil yang menyebabkan nelayan tradisional dengan jaring daya jangkauan pendek dan dangkal tidak mampu mengejar atau menangkap ikan secara masif, seperti juga dinyatakan Masyhuri (2006) dalam penelitiannya tentang tata kelola sumber daya laut; iii) *wis kasab* (sudah takdirnya); suatu pandangan hidup tentang keberuntungan dan tidak beruntungnya perolehan rezeki di laut. Jumlah ikan yang sedikit tentu membuat penghasilan nelayan turun. Mereka harus betul-betul menghitung biaya produksi dengan biaya kebutuhan hidup. Salah satu jalannya, menjadi nelayan juragan, sekaligus *pendego*.

Kedua, langkanya tenaga kerja muda yang memasuki profesi nelayan atau mengikuti kerja orangtuanya. Hal ini terlihat dari jumlah pemuda yang terlibat penangkapan ikan. Di Tunggulsari, pemuda lajang yang menjadi nelayan berjumlah enam orang. Kebanyakan mereka yang putus sekolah akibat ketiadaan biaya, orangtuanya terlalu lemah bekerja sendirian di laut, dan mereka yang mengaku diri mengalami kesulitan mengambil akses pekerjaan nonperikanan. Pemuda lajang yang mengikuti aktivitas Karang Taruna Kelompok Nelayan sebagai satu organ terpenting Kelompok Nelayan Sumber Harapan (KNSH), peraih juara I pelopor pemberdayaan tingkat nasional 2002, hanya berjumlah 12 orang. Selebihnya orang dewasa yang sudah menikah.

***Way of Life* Menjadi Nelayan mulai Ditinggalkan**

Penyebab pada butir pertama, kurangnya hasil tangkapan telah membuat pemuda tidak lagi betah pada sektor ini. Mereka lebih memilih bekerja di tempat lain, seperti buruh pabrik, karyawan toko, tukang becak atau kerjaan sederhana di kota Semarang, Tuban, Gresik dan Surabaya. Pemuda yang bekerja di luar sektor perikanan pun rata-rata disetujui orang tuanya. Adalah Pak Supeno, ketua KNSH dan penerima penghargaan kader terbaik dari Presiden tahun 2004, memiliki tiga orang anak. Semua anak memiliki pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan sektor perikanan. Satu orang menjadi guru, satu bekerja di travel agent, dan satu lagi menjadi buruh di Salatiga. Beliau

merasa gembira bahwa anak-anaknya dapat pekerjaan nonnelayan. Menurutnya, sekarang menjadi nelayan sulit, tidak cukup untuk biaya hidup harian rumah tangganya ketika nanti mereka menikah.

Sikap hidup pak Supeno ini sepertinya telah menjadi kecenderungan yang berlaku umum. Orang tua berharap anaknya dapat bekerja selain menjadi nelayan. Anak pun sepertinya mengerti harapan orang tuanya ini. Setelah menyelesaikan pendidikan SLTP, mereka mengadu nasib ke kota lain, baik melalui hubungan keluarga, ajakan teman, ataupun daftar secara terbuka ke pabrik. Setelah bekerja di tempat itu, umumnya mereka tidak kembali ke kampung halaman atau mengikuti jejak orang tuanya sebagai nelayan. Inilah dilema pergantian generasi nelayan yang tidak berjalan normal yang disebabkan ketimpangan daya dukung ekologis dan sumber daya yang dimiliki masyarakat.

Dampak terbesar dari kecenderungan ini adalah sedikitnya jumlah tenaga kerja muda sektor perikanan. Untuk mengatasi itu, seperti disebutkan, nelayan juragan pun bertindak sekalian menjadi *pendego* dari perahu miliknya atau orang lain. Pilihan mengambil *pendego* dari pihak lain yang dilakukan secara rutin terlalu banyak risiko keuangan, terlebih saat hasil tangkapan tidak cukup bagi pendapatan mereka. Bila pilihan mengambil *pendego* dilakukan, konsekuensi pengurangan *bagen* atas *raman* harus dipenuhi. Meskipun *pendego* hanya mendapatkan satu *bagen* dari *raman*, namun untuk keperluan yang berhubungan dengan *pendego* seperti makan dan lainnya bisa mencapai satu *bagen* lagi. Kalkulasi jumlah *bagen* atas *raman* hasil tangkapan inilah yang membuat nelayan juragan pun menjadi *pendego* sekaligus.

Sekarang ini dapat dinyatakan untuk mengikat *pendego* tidak lagi bisa dikenakan kewajiban *ngiteng* yang juga menjadi prasyarat dari *bagen*. Sekarang hitungan *bagen* $\frac{2}{3}$ *raman* untuk pemilik perahu, dan $\frac{1}{3}$ *raman* merupakan hak para *pendego*. Harga setengah *raman*, adalah harga perlengkapan perahu, solar, dan jaring; dan $\frac{1}{3}$ nya adalah jasa dari aktivitas pemilik perahu yang ikut menangkap ikan. Jadi, nelayan juragan-*pendego* mendapatkan hasil yang sama dengan jumlah *bagen* dari *pendegonya*. Jumlah pembedanya hanya terletak pada jumlah *bagen* dari *raman* yang diperuntukkan bagi modal perahu dan alat tangkapnya. Adapun urusan logistik (makan dan minum) para *pendego* harus membawa sendiri.

MELIHAT SECARA UTUH HUBUNGAN PATRON KLIEN *BAKUL-LANGGAN*

Perubahan dramatis juga terjadi pada posisi *bakul*. Sebelumnya, *bakul* dapat dikatakan sebagai *jeragan nemen* atau juragan sejati, karena kepemilikan alat produksi yang dititipkan kepada nelayan juragan. Sekarang mereka hanya menjadi pihak perantara perdagangan saja, dari *langgannya* kepada distributor. Meskipun begitu, untuk mempererat hubungan perantara itu, mereka juga tetap memberi plakat utang kepada *langgan*. Jumlah plakat utang itu tidak lagi sebesar sebelum 1997-an. Mereka mengutang *langgan* sebesar Rp 1-3 juta saja. Utang itu umumnya digunakan *langgan* untuk melengkapi alat tangkapan atau semata untuk kebutuhan. Alat produksi secara keseluruhan adalah milik nelayan *langgan*. Nelayan *langgan* inilah yang sekarang menjadi “*jeragan nemen*” (*masih dalam tanda kutip*).

Resistensi Langgan terhadap Bakul

Dalam konteks pedesaan Kaliore dan sebagian besar wilayah di pantai utara Jawa, sebelum tahun 1998, seorang *bakul* bisa memaksa dan mengancam *langgan* untuk menjual seluruh hasil tangkapan kepadanya. *Bakul* juga berhak penuh menetapkan harga, menentukan kualitas udang berdasar hasil sortirannya, dan tidak menyetujui permohonan utang lanjutan si *langgan*. Hal ini terjadi karena seluruh alat produksi dan penangkapan ikan merupakan hasil utangan penuh dari *bakul*.

Saat itu, *bakul* yang hendak menjadikan seseorang menjadi nelayan *langgannya*, ia harus membelikan perahu, jaring, mesin, termasuk memberikan utang kebutuhan konsumsi keluarga *langgan*. Jumlah utangan seorang *langgan* kepada *bakul* bisa mencapai Rp 12 juta. Padahal, mereka sendiri tidak akan mau dan tidak akan mampu membayar utang karena umumnya utang akan dibayarkan oleh *bakul* lain yang menyetujui permohonan dirinya menjadi *langgan* baru dari seorang *bakul*.

Kebiasaan utang bulat-bulatan, hubungan ketat dan keras antara *bakul* dan *langgan* di atas terputus pada tahun-tahun reformasi. Perubahan atas “takdir alam” menemukan momen tepat. Banyak *bakul* bangkrut dan berjatuh karena *langgan* tidak mau membayar utang atau mengembalikan alat produksi yang dibelikan. Bila *bakul* menagih, tidak jarang *langgan* mempersilakan mereka untuk mengambil perahunya yang sudah rusak di tepian pantai.

Para *langgan* berani melakukannya dengan argumentasi mereka sesungguhnya tidak berutang karena hanya menjalankan usaha para *bakul*. Buktinya, *bakul* menetapkan harga hasil tangkapan sesuai keinginannya tidak berdasarkan harga pasar. Ketika alat produksi rusak, dengan sendirinya hubungan kerja terputus, dan *bakul* dipersilakan mengambil sendiri alat produksinya. Kalau pun mereka pernah berutang kebutuhan konsumsi keluarga, itu adalah bagian tanggung jawab *bakul* yang mempekerjakan diri dan keluarganya. Karena itulah, hubungan antara *langgan* dengan *bakul* sekarang ini tidak sekuat dan sekeras dekade sebelumnya (tahun 1980-1997-an).

Keberanian di atas dilandasi gerakan sosial bersama nelayan sepanjang pantai utara Jawa, yaitu diilhami semangat reformasi tahun 1997. Lihat saja misalnya, nelayan Demak, Gebang, Ambulu, Tegal, Brebes, Pekalongan, Indramayu, dan Subang melakukan demo pemutusan hubungan kerja *bakul* dan *langgan* atas dasar utang; atau orang LSM menyebutnya sebagai "utang najis"; di mana utang ini bisa memperbudak dan memiskinkan masyarakat nelayan sepanjang masa (Dahuri 2004). Tahun-tahun gerakan itu sebagai tonggak baru kehidupan nelayan tradisional yang melepaskan diri dari jeratan utang *bakul*. Konsekuensinya, nelayan sendiri yang harus menyediakan alat produksi karena hal ini tidak mungkin lagi diberikan *bakul*.

Sayangnya, dalam penyediaan alat produksi, mereka kembali berutang meskipun tidak kepada *bakul*, tetapi ke *bank titil*. Utang ini menjadi bom waktu proses kemiskinan jangka panjang. Nelayan pun terlibat kembali utang kepada *bakul* walaupun jumlahnya tidak sebesar dahulu. Utang dianalogikan "tanda itikad baik" dari *bakul* kepada *langgan*. Tetap melekatnya kata *langgan* dalam hubungan sosial-ekonomi ini sebenarnya memiliki potensi kuat pada proses pengulangan sejarah, yaitu hubungan *bakul* dan *langgan* yang keras dan didasari utang. Bila hal ini terus berlanjut, maka jerat kemiskinan dari tersusunnya kembali lembaga tradisi dalam arti relasi sosial yang mereproduksi kemiskinan akan terus-menerus ada di Tunggulsari.

Bakul dan Sistem Penetapan Harga

Di TPI Pecangaan Pati, ada enam orang *bakul* yang memberi plakat utang kepada *langgan*, sedangkan di TPI Tunggulsari ada lima *bakul*. Dalam kegiatan ekonomi ini, tidak ada batasan formal geografis dan

administrasi pemerintahan. Seorang *bakul* Tunggulsari bisa memiliki *langgan* dari Pecangaan. Sebaliknya, *bakul* Pecangaan juga dapat memiliki *langgan* dari Tunggulsari. Karena itu, dalam penjualan hasil tangkapan yang menjadi dasarnya adalah ikatan *bakul*, bukan ikatan wilayah. Hal ini sepenuhnya hak pelanggan. Seorang *langgan* biasanya memiliki utang antara 1-3 juta kepada *bakul*. Utang ini menjadi alat ikat hubungan atau tanda itikad baik antara *bakul* dengan *langgan*, tetapi bukan alat ikat penuh. Bisa jadi seorang *langgan* pindah ke *bakul* lain setelah *bakul* baru membayar utang *langgan* kepada *bakul* awal tempat ia berutang.

Sekarang ini, seorang *langgan* untuk pindah *bakul* mudah caranya. Ia menyatakan keinginannya untuk pindah (cara sopan) atau dengan cara menjual hasil tangkapan kepada *bakul* lain (cara tidak sopan). Memang *bakul* lain merasa *pekewuh* kepada *bakul* awal calon *langgannya* itu, tetapi bila ia sendiri membutuhkan *langgannya* bertambah atau memang karena adanya kedekatan personal, ia bisa saja membayari pinjaman *langgan* itu terhadap *bakul* lama. Apalagi, *bakul* sekarang tidak lagi memberi pinjaman biaya pembelian mesin, perahu, dan *saja*. Hal ini berbeda dengan waktu sebelumnya, yaitu *bakul* harus menyediakan semua keperluan melautnya *langgan*. Untuk membeli peralatan melaut, nelayan sekarang banyak berutang kepada bank *titil* atau koperasi keuangan mikro (yang juga bersifat *rente*), di samping juga akan berutang kepada *bakul*. Kepada *bakul*, mereka berani berutang untuk membeli salah satu alat produksi atau kebutuhan konsumsi yang mendesak.

Artinya, sekarang ini utang nelayan minimal bercabang dua. Cabang pertama, ia berutang ke *bank titil* atau lembaga keuangan mikro yang mengatasnamakan koperasi dengan konsekuensi harus menanggung bunga tinggi dan mencekik. Untuk membayar angsurannya, mereka tidak jarang berutang lagi kepada *bank titil* lain. Satu keluarga nelayan bisa memiliki utang kepada dua *bank titil* atau koperasi. Cabang kedua, mereka juga menanggung utang ke *bakul*. Keadaan ini berbanding terbalik dengan keadaan sebelumnya, yakni hubungan patron klien *bakul-langgan* menjauhkan mereka dari sistem *rente* yang membahayakan sistem subsistensi yang dijalaninya selama ini.

Dua cabang peruntungan dari bentuk baru hubungan *bakul-langgan* di atas yang membedakannya dengan hubungan relasional *bakul* dan

langgan di zaman sebelumnya yang kerap kali dipersalahkan oleh pengambil kebijakan. Dahulu, nelayan *langgan* berutang besar tanpa bunga kepada *bakul* dan sesekali berutang kecil kepada *bank titil* untuk sekadar memenuhi kebutuhan konsumsi bila terdesak. Tetapi sekarang nelayan berutang besar dengan rente besar kepada *bank titil*, dan berutang kecil kepada *bakulnya*. Kalau harus memilih dari pilihan tidak mengenakan, pilihan pada kebiasaan dahulu lebih sedikit risikonya.

Penentuan *Size* Udang: Mencari Keuntungan dengan Tidak Mencekik *Langgan*

Utang kepada *bakul* tidak memiliki konsekuensi dalam bentuk bunga mencekik dan berlipat ganda. Utang hanya menuntut konsekuensi bahwa nelayan *langgan* harus menjual hasil tangkapan kepada mereka. Padahal, sekarang ini harga itu ditetapkan berdasar harga pasar. Apalagi, selisih harga penjualan kepada *bakul* dengan pihak distributor sebenarnya tidak tinggi, berkisar ribuan saja dalam per kilo per *sizenya*.

Angka ribuan (seribu sampai sepuluh ribu) pada masyarakat Kaliori memang masih bernilai tinggi. Perdebatan menentukan harga tampak pada saat penghitungan jumlah udang dalam satu *size* kilogram. Semakin banyak jumlah udang dalam per kilogram, akan semakin murah. Hal ini dikarenakan *sizenya* kecil, dalam satu kilogram bisa berjumlah 30-36 ekor udang. Kuantitas udang dalam *size* ini umumnya dihargai Rp 62.000. Sementara itu, semakin sedikit udang dalam per kilogram karena *sizenya* besar, harganya tinggi. Dalam kapasitas *size* ini, 1 kilogram udang biasanya terdapat 25-28 ekor dan dihargai Rp 68-70ribu/kg.

Para *bakul* di Kaliori sekarang ini mencari keuntungan dengan cara mencari selisih *sizenya*. Mereka membeli udang *langgan* dengan cara borongan tanpa disortir dan jumlah udang itu dihitung berapa ekornya sehingga dapat dicari angka tengahnya. Setelah jumlah diketahui, ia menetapkan harga kepada *langgan* sesuai harga pasar yang berlaku di TPI. Setelah terkumpul hasil semua *langgan* dan sebelum menjual kembali ke distributor, para *bakul* kembali memilah udang hasil pembelian itu.

Udang yang berukuran besar dipisahkan ke satu ember tersendiri, termasuk dengan memijat atau meluruskan udang yang bungkuk itu

agar terlihat besar, dan mungkin juga agar tubuh udang kemasukan air sehingga *sizenya* bertambah besar. Adapun udang kecil disisihkan ke ember lain. Semua jumlah udang di kedua ember berbeda itu dicatat dan diprediksi jumlah penjualannya. Semua hasil *bakul* akan disortir kembali oleh pihak distributor, seperti PT Udang Sari milik H. Yum di Rembang. Pemisahan *size* udang dalam dua ember berbeda sebelumnya akan mempercepat proses sortiran, dan diharapkan dapat menguntungkan *bakul*, karena mereka telah terlebih dahulu menentukan kategori *size* udangnya.

Selisih *size* udang itulah yang menjadi keuntungan *bakul* karena bila bertumpu pada selisih harga semata, keuntungan *bakul* sangat tipis. Selisih harga *bakul* dengan pemasok atau distributor tidak lebih dari Rp2.000 - 5.000 per kilo pada satu jenis *sizenya*. Dengan cara ini, sekiranya *omzet* pembelian udang *langgan* mencapai Rp 500.000, selisih harga dan selisih *size* membuahkan keuntungan sebesar Rp 40.000 - 70.000 ribu (8-15% dari omzet).

Selain udang dikategorikan dalam *size*, udang juga dikategorikan secara kualitasnya, yaitu *udang mutih* dan udang BS-an. *Udang mutih* di Kaliori umumnya dikategorikan sebagai *urang nemen* (Jerbung atau BB di Cirebon), *mutih biasa*, dan BS (kecil dan rusak-berharga 50 ribu). Pemisahan udang krosok berkulit keras tidak ada. Kategori udang ini dimasukkan sebagai udang BS. Harga pasar yang berlaku di Kaliori dan Rembang untuk *urang nemen* bernilai 75-95 ribu tergantung permintaan pasar. Udang jenis ini yang menjadi ukuran *rejuh* atau *leyepnya* musim tangkapan nelayan.

Seandainya seorang nelayan *saja plastik* mendapatkan ikan, hasilnya dapat dijual bebas; bisa tidak ke *bakul* udangnya. Mereka bisa menjualnya ke pasar bebas, perorangan, atau *bakul iwak*, bila si nelayan meminjam uang kepadanya. Di Tunggulsari *bakul iwak* hanya satu orang, tetapi nelayan Tunggulsari bisa terlibat dengan *bakul iwak* yang berasal dari Pecangaan Pati. Selain udang yang menjadi hak pembelian *bakul* udang, seluruh hasil tangkapan berupa ikan dan rajungan nelayan harus dijual kepada *bakul* ikan, di mana ia berutang di sana. Dalam arti ini, seorang atau keluarga nelayan akhirnya bisa terlibat utang kepada maksimalnya dua jenis *bakul*; dan satu atau lebih berutang kepada koperasi dan *bank titil*.

NEGOSIASI DALAM HUBUNGAN *BAKUL-LANGGAN*

Ada dua fenomena penting era baru kehidupan nelayan berdasarkan sistem hubungan *bakul* dan *langgan*. *Pertama*, era ini tidak hanya semakin meluaskan persebaran utang nelayan kepada pihak lain (*bank titil* dan lembaga keuangan mikro), tetapi juga menambah besaran nominalisasi utang alat yang dibutuhkan nelayan dalam sistem *rente* berbahaya. Prosesnya seperti gurita kapitalisme yang mementingkan pasar nominal kredit, tanpa memperhatikan kemampuan sumber daya komunitas. Bila dahulu nelayan dimakan hiu kecil bernama *bakul*, sekarang mereka sedang dimakan bersama sekelompok hiu besar dari apa yang dinamakan *bank titil* dan lembaga keuangan mikro. Meskipun nelayan *murko* (kerja keras pada bidang apa saja) sekalipun, hasilnya tidak akan mencukupi kewajiban piutangnya itu.

Kedua, era baru ini sebenarnya telah melahirkan adanya pembaruan hubungan antara *bakul* dan *langgan* berdasarkan negosiasi, yang sebelumnya tidak dikenal. Negosiasi itu bisa berkisar dalam soal penetapan harga, penentuan *size* dan sortiran, dan hubungan yang dibangun berdasarkan kedekatan personal dan fungsional. Hal seperti ini terlihat jelas dalam satu peristiwa antara *bakul* dan *langgan* yang terjadi di TPI Tunggulsari yang tidak akan mungkin terjadi pada dekade sebelumnya.

Seorang perempuan membawa satu ember besar berisi *udang mutihan*. Di dalamnya ada udang berukuran besar, diperkirakan *size* 25-28. Sewaktu terjadi jual beli dan penghitungan harga udang, terjadi perdebatan sengit dengan *bakul*. Perempuan itu, menolak pemberian harga yang ditetapkan *bakul*. Sang *bakul* memasukkan *udang mutihannya* itu ke *size* 30. Artinya, terjadi pengurangan harga sekitar 5ribu an per kilogram. Padahal jumlah udang pada satu ember mencapai berat 5 kg 8 ons.

Istri nelayan Alimin itu menolak keras dengan kata-kata, sambil *prengat-prengut* dan melemparkan udangnya kembali ke embernanya dari ember *bakul*. Sang *bakul* berusaha menghitung kembali perkiraan untung ruginya, dan tetap menawar untuk menetapkan harga yang ditaksir, yaitu Rp 285 ribu. Si perempuan tetap menolak, dan akhirnya sang *bakul* memberikan harga senilai Rp 314 ribu, terdapat selisih hampir 30 ribu. Si

langgan pulang tanpa pamit, dan *bakul* sepertinya kecewa berat.

Dalam kasus di atas, si *langgan* menjadi pemenang, dan sang *bakul* harus mengalah. Peristiwa ini bagi saya menarik karena hubungan antara *bakul* dan *langgan* tidak lagi bersifat patron-klien mutlak seperti masa sebelumnya. *Langgan* telah mampu dan berhasil melakukan negosiasi. Rupanya, hampir semua istri nelayan, yang memiliki pembagian kerja, menjualkan hasil tangkapan suaminya sekarang mulai berani melakukan negosiasi. Posisi *bakul* sekarang tidak seenak dahulu. Mereka juga harus pandai berhitung dan menghadapi *langgannya* dengan baik. Hubungan *bakul* dan *langgan*, sebagai bagian dari lembaga tradisi dalam arti relasi sosial ekonomi, yang antitesis itu merujuk pada satu kepentingan bersama, yaitu sama-sama saling menguntungkan dan menyejahterakan kedua belah pihak. Sebuah putaran ”takdir alam” yang dapat membawa perubahan, baik bagi kesejahteraan masyarakat nelayan, terlebih bila sang nelayan bisa terlepas dan mandiri dari gurita kapitalisme yang ada kecenderungannya pada era sekarang ini.

SIMPULAN

Bagaimana pun penilaian pihak luar, hubungan *bakul-langgan* yang juga memengaruhi siapa yang disebut *jeragan nemen*, merupakan suatu hubungan strategis bidang sosial-ekonomi. Bahkan, hubungan tersebut dapat dikatakan sebagai lembaga tradisi yang terbentuk seiring kesejahteraan masyarakat nelayan itu sendiri. Sebagai lembaga tradisi ia merupakan wadah yang cocok dalam menjaga eksistensi pelakunya. Ia pun bersifat adaptif terhadap perubahan yang ada. Penelitian telah menemukan fakta bahwa sebelum tahun 1997, hubungan *bakul-langgan* bersifat patron-klien mutlak yang masih juga menjaga eksistensi pihak klien meskipun dalam batas subsistensi.

Awal hubungan ini juga meletakkan *bakul* dalam posisi *jeragan nemen* bila istilah juragan didefinisikan sebagai pemilik alat produksi yang dikelola nelayan *langgannya*. Melalui piutang tanpa sistem rente, *bakul* pantas menjadi *jeragan nemen*. Kualitas dari identitas *jeragan nemen* sendiri mengalami pereduksian dari makna awalnya sebagai *blegendar* di zaman sebelumnya. Nelayan *langgan* menjadi “*jeragan kecil*” yang memiliki *pendego* untuk menggerakkan dan mengelola alat produksi juragan besarnya alias *bakul*. Setiap elemen (distributor-

bakul-jeragan-pendego) semuanya saling terkait, dan masing-masing elemen diuntungkan sesuai porsinya masing-masing.

Pihak yang paling diuntungkan dari hubungan *bakul-langgan* pada periode sebelum tahun 1998 adalah distributor dan *bakul* sebagai pihak patron besar. Kedua pihak inilah yang mendominasi seluruh sumber daya yang bersifat alokatif dan otoritatif dari kehidupan sosial-ekonomi masyarakat nelayan. Sementara itu, *jeragan* (sebagai patron kecil sekaligus klien) dan *pendego* (sebagai klien) ada pada posisi dilematis. Keduanya bisa dianggap mendapatkan keuntungan dari hubungan tersebut bila didasari pada pertimbangan pemberian modal, sekaligus pemberian ruang bagi terwujudnya *way of life* menjadi nelayan. Terlebih ketika akses terhadap pekerjaan dan permodalan dari pemerintah sulit dijangkau. Kenyataannya, saat itu banyak juga para *jeragan* kecil yang menjadi *bakul* dan *pendegonya* menjadi *jeragan* kecilnya. Dengan demikian, sebagai *bakul* baru pun akan mendapatkan keuntungan dari selisih harga pasar *bakul* dengan harga pasar distributor. Secara ekonomi riil, *bakul* diuntungkan oleh adanya jaminan *supply* komoditas yang bisa dijualbelikan kepada pihak distributornya. Di sisi lain, pemerintah juga mendiamkan sistem yang disinyalir ikut serta dalam proses pemiskinan masyarakat nelayan itu. Pemerintah sepertinya hanya melihat bahwa keamanan *supply* yang berasal dari para *bakul* ini penting untuk menjaga keberlangsungan ekspor ikan-udang di pasar global dan kegiatan ekonomi perikanan di masyarakat lokal.

Pascatahun 1998, terjadi perubahan yang cukup signifikan. Lembaga tradisi *bakul-langgan* dan *juragan-pendego* beserta hubungannya mengalami transisi ekonomi riil dan dinamika sosial yang lebih bersifat terbuka dan negosiasif. *Bakul* hanya menjadi pihak perantara perdagangan saja, dari nelayan *langgan* kepada pihak distributor. Para *langgan* dan *pendego* yang sebelum tahun 1998 berada pada tingkat klien, sedikit demi sedikit beranjak naik. Hubungan sosial ekonomi itu pun akhirnya bersifat fungsional. Sekarang ini, seluruh alat produksi hampir dapat dikatakan milik nelayan *langgan*. Merekalah yang sekarang menjadi *jeragan nemen*, bila tidak lagi berutang kepada *bakul*. Dapat dikatakan bahwa dekade tahun 2000 disebut sebagai dekade perubahan nasib dengan adanya transisi ekonomi riil dan dinamika sosial dari hubungan *bakul-langgan* (dan *juragan-pendego*). Namun demikian, masyarakat sendiri melalui kekuatan lembaga tradisinya

harus disadarkan untuk tidak lagi terlibat dalam lingkaran utang, baik kepada *bakul* ataupun *bank titil*. Pemerintah melalui kewenangannya harus mampu membatasi ruang gerak para pelaku pasar (uang dan sektor perikanan) yang menawarkan permodalan atas nama koperasi, padahal di dalamnya sarat dengan sistem rente yang menjerat kembali atau semakin membenamkan nelayan pada kemiskinan.

PUSTAKA ACUAN

Buku

- Adhuri, Dedi S. 2004. *Pengelolaan Sumber Daya Alam Terpadu (Co-Management)*. Jakarta: LIPI Press.
- Ali, Surmiati. 2006. "Hak Ulayat Pengelolaan Laut" dalam *Konflik Pengelolaan Sumberdaya Laut*. Jakarta: LIPI Press.
- Dahuri, Rokmin. 2004. *Keanekaragaman Hayati Laut: Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Departemen Kelautan dan Perikanan. 2002. *Proyeksi Ekspor Sektor Kelautan*. Jakarta: DKP.
- . 2002. *Tata Kelola Kawasan Bahari Terpadu*. Jakarta: DKP.
- Giddens, Anthony. 1984. *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. Cambridge: Polity Press.
- . 1979. *Central Problems in Social Theory: Action, Structure, and Contradiction in Social Analysis*. California: University of California Press.
- Terjemahan Dariyanto. 2009. *Problematika Utama dalam Teori Sosial: Aksi, Struktur, dan Kontradiksi dalam Analisis Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kabupaten Rembang. 2009. *Profil Kabupaten Rembang*. Rembang: Setda.
- . 2010. *Program Pengentasan Kemiskinan (Pronangkis) Kabupaten Rembang*. Rembang: Setda dan Bappeda.
- Kecamatan Kaliori. 2007. *Monografi Desa Kecamatan Kaliori 2006*. Kaliori: Sescam.
- Kleden-Probonegoro, Ninuk & M. Alie Humaedi. 2010. *Etnografi Kemiskinan*. Jakarta: LIPI Press.
- Kusaeri. 2009. *Dongeng Rakyat dari Rembang*. Rembang: Pradana
- Listyaningsih, Umi. 2004. *Dinamika Kemiskinan di Yogyakarta*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM-Partneship For Economic Growth USAID.

- Masyhuri, Imron. 2006. *Ko-Manajemen dalam Pengelolaan Sumberdaya Laut: Kasus Kota Tegal*. Jakarta: LIPI Press.
- Mohamad, Goenawan. 2005. "Sebuah Ruang, 17 Ribu Pulau". *Majalah Tempo*, Edisi Khusus 60 Tahun Kemerdekaan, 15-21 Agustus 2005.
- Mubyarto, dkk. 1984. *Nelayan dan Kemiskinan: Beberapa Kasus Wilayah Nelayan*. Yogyakarta: UGM Press.
- Popkin, Samuel. 1979. *The Rational Peasant; The Political Economy of Rural Society in Vietnam*. Berkeley: University of California Press.
- Satria, Arif. 2009. *Ekologi Politik Nelayan*. Yogyakarta: LkiS.
- . 2003.a. "Gerbang Mina Bahari" dalam *Gatra*, No. 52 Tahun IX, 15 November.
- . 2003.b. "Menuju Gerakan Kelautan" dalam *Majalah Agrimedia*, Vol. 8, No. 2 April.
- Saort, J.P. 1984. *An Introduction to Urban Geography*. London: Routledge dan Kegan Paul.
- Semedi, Pudjo. 2001. *Close to the Stone, Far from the Throne. The Story of a Javanese Fishing Community, 1820s-1990s*. Amsterdam: Universitiet van Amsterdam.
- Singarimbun, Masri dan D.H. Penny. 1976. *Penduduk dan Kemiskinan: Kasus Sriharjo di Pedesaan Jawa*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.

Jurnal

- Suhartono, Martin. 2000. "Dinamika Ruang-Waktu dari Distansiasi ke Transfigurasi" dalam *Basis*. Yogyakarta: Kanisius: 2000.
- Wirahadikusumah, Miftah. 1991. "Sektor Informal sebagai Bumper pada Masyarakat Kapitalis. Dalam *Prisma*, 5 Mei 1991. Jakarta: LP3ES.

Laporan

- Badan Pusat Statistik. 2007. *Laporan Ringkas Pertumbuhan Ekonomi Mikro*. Jakarta: BPS.
- Institut Pertanian Bogor. 1984. *Bunga Rampai Hasil Penelitian Masyarakat Pesisir Jawa Barat dan Jawa Tengah*. Bogor: LPPM.
- . 1989. *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Pantai Utara Jawa*. Bogor: LKMP & LPPM.
- UNDIP. 2002. *Laporan Penelitian Sejarah Kabupaten Rembang*. Semarang: UNDIP dan Kabupaten Rembang.
- UPK Kaliori. 2009. *Laporan Akhir Kegiatan Prasarana Pembangunan Drainase dan Kegiatan Ekonomi Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Tahun 2008*. Rembang: PNP Mandiri.

Yetty Rochwulaningsih. 2002. *Sejarah Industri Garam Rakyat di Rembang*. Laporan Penelitian. Semarang: UNDIP.

Internet

Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dalam www.dkp.go.id, diunduh tanggal 10 Januari 2011.

